



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BONTANG**

**NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap pengisian Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dan untuk menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum Kelas Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. tim pengarah;
  2. tim pelaksana, yang terbagi atas:
    - a) tim manajemen perubahan;
    - b) tim penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan;
    - c) tim penataan organisasi/kelembagaan;
    - d) tim penataan tata laksana;
    - e) tim sistem manajemen sumber daya manusia;
    - f) tim pengawasan;
    - g) tim penguatan akuntabilitas;
    - h) tim pelayanan publik; dan
    - i) tim agen perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Tanti Prastuti



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG NOMOR 28 TAHUN  
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Muzarobby Renfly	Ketua KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Ketua
2.	Acis Maidy Muspa	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
3.	Hamzah	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
4.	Ozzie Osbourne Hannaniel	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rina Megawati Harsono	Anggota KPU Kota Bontang	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Ketua
2.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
3.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor
4.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Kamaruddin	Pengelola Layanan Operasional	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kodrat Alam	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor
3.	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
1.	Tanti Prastuti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat	Penyusun Materi Hukum dan Per Undang-Undangan	Asesor
3.	Zefanya Yuriska Septin	Penyusun Materi Hukum dan Per Undang-Undangan	Anggota
4.	Arniwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN		
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor
3.	Suci Ayu Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Arniwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor
3.	Suci Ayu Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fatma Fauzia	Penyusun Materi Hukum dan Per Undang-Undangan	Asesor
3.	Suci Ayu Lestari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
VI.	TIM PENGAWASAN		
1.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aksan	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor
3.	Harlina	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor
3.	Herwinda Pradhita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Baihaki	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor
3.	Arniwati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN		
1.	Mohammad Hadi Winata	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ryanti Tiballa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor
3.	Harlina	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

Tanti Prastuti

